

## **BAB II**

### **DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

#### **2.1. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

##### **2.1.1. Definisi Akuntabilitas**

Menurut Mardiasmo (2006), akuntabilitas merupakan dasar-dasar pelaporan keuangan di pemerintah yang di dasari oleh adanya hak masyarakat untuk mengetahui dan menerima penjelasan atas pengumpulan sumber daya dan penggunaannya.

Suatu syarat agar akuntabilitas dapat tercapai adalah dengan sistem pemerintahan yang dapat menjamin segala sumber daya yang dimiliki harus transparan secara umum, memiliki komitmen tinggi dan menunjukkan hasil pencapaian kinerja yang baik. Berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No.239/IX/6/8/2003, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah

“Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periode”

##### **2.1.2. Indikator Pengukuran Akuntabilitas kinerja**

Alat untuk melakukan pengukuran kinerja demi mendorong terciptanya akuntabilitas publik, menurut Wibowo (2014) yaitu dengan cara:

1. Pastikan bahwa persyaratan yang diinginkan terpenuhi;
2. Mengupayakan kriteria kinerja untuk perbandingan;
3. Jaga jarak agar orang lain dapat memantau kemajuan kinerja;

4. Menentukan pentingnya masalah kualitas dan memprioritaskan perhatian;
5. Hindari konsekuensi dari kualitas kinerja yang buruk;
6. Mencari umpan balik dalam merangsang upaya perbaikan.

Pada penelitian ini variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan diukur dengan kuesioner yang diadopsi dari penelitian Silalahi (2017).

## **2.2. Good Governance**

Dalam pemerintahan, *good governance* diartikan menjadi pemerintah baik atau pemerintahan bersih. Menurut World Bank (1992) *good governance* memiliki definisi

“sebagai salah satu penyelenggara manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar efisien, penghindaran, salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan *political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.”

Hal ini dapat diartikan bahwa suatu negara memiliki kekuasaan atau mampu mengelola sumber daya untuk kepentingan masyarakatnya.

Dari uraian di atas, maka *good governance* disimpulkan sebagai tata kelola pemerintah di dalam sumber daya, sosial, dan ekonomi dalam membangun dan mengelola pemerintahan yang baik. Yang menjadi acuan *good governance* adalah pertanggung jawaban secara bersama terhadap konsep-konsep yang berkaitan dengan proses pencapaian hasil dari implementasi tersebut (Mardiasmo, 2006).

### **2.2.1. Karakteristik Good Governance**

Menurut KPK (2008) karakteristik dalam praktik dan pengukuran penyelenggaraan *good governance* yaitu:

1. Partisipasi

Partisipasi adalah setiap individu memiliki hak suara yang sama melalui lembaga-lembaga dalam menyampaikan aspirasinya, baik langsung maupun tidak.

2. Aturan Hukum

Dalam tata pemerintahan yang baik harus didorong oleh peraturan hukum yang adil dan dapat dipatuhi, yang mana berguna untuk menjaga stabilitas di dalam masyarakat. Peraturan yang diatur pemerintah akan menjadi pengendali atas semua kegiatan dan bersifat tegas serta mengikat .

3. Transparansi

Dalam tatanan pemerintahan yang baik harus memiliki transparansi atas setiap keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah harus menyediakan transparansi yang berupa informasi pemerintahan yang dapat diakses oleh tiap individu dan mudah untuk dipahami.

4. Responsif

Pemerintah seharusnya tanggap persoalan-persoalan yang terjadi di dalam masyarakat. Pemerintah seharusnya dapat memenuhi dan melayani kebutuhan masyarakat tanpa harus menunggu adanya aspirasi-aspirasi publik.

5. Konsensus

Pemerintahan akan yang menjadi perantara konsensus atau kesepakatan terhadap tiap-tiap pihak yang bersangkutan.

6. Kesetaraan Keadilan

Kesetaraan adalah perlakuan yang sama terhadap pelayanan publik. Pemerintah harus bertindak adil dalam melayani masyarakat, terlepas dari kedudukan, kepercayaan, etnis, atau status sosial mereka.

7. Efektivitas dan Efisiensi

Efektivitas dan efisiensi berarti semua kegiatan dan semua proses diharapkan menciptakan apa yang sesungguhnya dalam memenuhi kebutuhannya berdasarkan pemanfaatan terbaik.

8. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan pengambilan keputusan di bidang pemerintahan, swasta dan masyarakat yang harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat umum.

9. Visi Strategis

Pandangan yang dimiliki pemerintah dan publik berjangka panjang dan bertujuan menciptakan pemerintahan yang terbaik dalam membangun manusia yang akan mewujudkan perubahan.

### 2.2.2. Indikator Pengukuran *Good Governance*

Menurut Sedarmayanti (2014) indikator *good governance* adalah partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan penegakan hukum. Berikut adalah penjelasan dan indikator pengukurannya:

1. Partisipasi adalah setiap orang baik laki-laki ataupun perempuan harus memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan sesuai dengan kepentingannya.
2. Transparansi adalah harus dibangunnya kerangka kebebasan aliran informasi berbagai proses, kelembagaan, dan informasi yang harus dapat di akses secara bebas oleh mereka yang membutuhkan.
3. Akuntabilitas adalah para pengambil keputusan dalam organisasi sektor pelayanan dan warga negara memiliki pertanggungjawaban kepada publik sebagaimana halnya pengambil keputusan yang memiliki pertanggungjawaban yang berbeda beda.
4. Efektivitas adalah proses dan lembaga yang menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia dengan sebaik mungkin.
5. Penegakan hukum adalah hukum yang harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum hak asasi manusia.

Pada penelitian ini variabel *good governance* akan diukur dengan kuesioner yang diadopsi dari penelitian Christy (2020)

### 2.3. Sistem Pengendalian Internal

Terkait akan akuntabilitas, suatu pelaksanaan sistem pengendalian internal yang baik atau kurang baik akan dapat memberikan dampak terhadap kualitas dari akuntabilitas pemerintah. Pemerintah akan mendukung pengguna sumber daya dalam pengoptimalan tujuan bisnis pemerintah. Pengendalian ini memiliki tujuan utama dalam untuk mendapat wawasan dan informasi yang tepat dan non-keuangan mengenai bisnis pemerintah sebagai tujuan pengambilan keputusan. Pemerintah sebagai manajer akan memeriksa efektivitas penerapan *control* agar beroperasi sebagaimana yang diinginkan dan apakah akuntabilitas telah diterapkan secara efektif. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, sistem pengendalian internal dapat didefinisikan sebagai

“proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.”

#### 2.3.1. Tujuan Pengendalian Internal

Arens, *et al.* (2002) menyatakan pengendalian internal merupakan suatu tata cara yang bertujuan dalam memberi keyakinan lengkap bahwa manajemen bertujuan dalam mencapai hal berikut:

1. Keyakinan dalam laporan keuangan;
2. Operasi yang efektif dan efisien;
3. Patuh akan hukum dan peraturan perundang-undangan.

Arens, *et al.* (2002) mengatakan bahwa pengendalian internal memiliki komponen berikut:

1. Aktivitas pengendalian;
2. Lingkungan pengendalian;
3. Pemantauan;
4. Penilaian risiko; serta
5. Komunikasi dan informasi.

### **2.3.2. Indikator Pengendalian Internal**

Berdasarkan Arens, *et al* (2002) berpendapat bahwa pengukuran pengendalian internal adalah sebagai berikut:

1. Pembagian penugasan yang tepat;
2. Persetujuan tepat atas transaksi dan aktivitas;
3. Dokumentasi terhadap catatan yang lengkap;
4. Manajemen fisik bagi pencatatan; dan
5. Evaluasi kinerja yang independen.

Pada penelitian ini variabel pengendalian internal akan diukur dengan kuesioner yang diadopsi dari penelitian Tamba (2021).

## **2.4. Kejelasan Sasaran Anggaran**

### **2.4.1. Definisi Kejelasan Sasaran Anggaran**

Kenis (1979) berpendapat bahwa kejelasan sasaran anggaran adalah sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut.

#### **2.4.2. Indikator Kejelasan Sasaran Anggaran**

Agar pemerintahan dapat berjalan lebih efektif maka kejelasan sasaran anggaran dapat mendorong pemerintah untuk menciptakan tatanan pemerintahan baik. Terdapat 7 indikator pengukuran kejelasan sasaran anggaran yaitu:

1. Objektif , merinci yang menjadi tujuan dari penugasan yang harus diselesaikan.
2. Kinerja, didefinisikan sebagai pengukuran pertanyaan.
3. Standar, penetapan batasan yang menjadi standar yang mau dicapai.
4. Jangka waktu, menentukan batasan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan.
5. Target prioritas, melakukan penetapan yang menjadi target prioritas
6. Tingkat kesulitan, tetapkan tujuan sesuai dengan kesulitan dan kepentingannya.
7. Koordinasi, identifikasi apa yang dapat di koordinasikan.

Pada penelitian ini variabel kejelasan sasaran anggaran akan diukur dengan kuesioner yang diadopsi dari penelitian Samosir (2020).

#### **2.5. Teori Agensi**

Teori agensi menurut Godfrey, *et al.* (2010) adalah teori yang membahas adanya masalah antar pemilik (*principal*) dan manajer (*agent*). Pada teori agensi, terdapat istilah hubungan agensi. Menurut Jensen & Meckling (1976) dalam Godfrey, *et al.* (2010), hubungan agensi adalah kontrak di mana satu atau lebih



orang melibatkan orang lain untuk melakukan beberapa layanan atas nama mereka, yang melibatkan pendelegasian beberapa otoritas pengambilan keputusan kepada agen. Menurut Godfrey, *et al.* (2010) teori agensi didasari pada asumsi bahwa masing-masing pihak berjalan sesuai dengan keinginan dan kepentingan tiap individu. Maka dari itu, terdapat kemungkinan jika tindakan yang dilakukan manajer akan memaksimalkan keuntungan pribadinya seperti menambah daftar anggaran, melakukan manajemen laba, memalsukan data biaya, dan tindakan-tindakan lainnya. Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan timbulnya perbedaan kepentingan antara pemilik perusahaan dengan manajer, salah satunya adalah *horizon problem*.

*Horizon problem* adalah masalah yang terjadi karena adanya perbedaan jangka waktu pemikiran antara pemilik dan manajer (Godfrey, *et al* 2010). Pemilik cenderung tertarik pada imbal hasil yang akan diperoleh dalam jangka panjang, sedangkan manajer hanya tertarik pada imbal hasil yang akan diperoleh selama manajer masih bekerja.

Dengan teori keagenan (*agency theory*) yang menjadi pokok acuan, Haryanto (2008) berpendapat jika tanggung jawab publik dapat diartikan sebagai kewajiban dalam mengungkapkan kepada *principal* yang memiliki hak dan wewenang untuk meminta pertanggungjawaban *agent* atas semua tindakan-tindakan yang menjadi tanggung jawabnya. Sehingga dalam konteks pemerintahan, akuntabilitas adalah faktor kunci menjadi pemerintahan baik dan telah terbukti. Pemerintah harus terus berinovasi dan mengoptimalkan kinerja instansi pemerintah secara efektif dan efisien.

## **2.6. Hubungan Antar Variabel**

### **2.6.1. *Good Governance* Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Konsep yang menjadi suatu acuan *good governance* dalam pengambilan keputusan bersama dengan aktivitas yang mampu dipertanggungjawabkan (Mardiasmo, 2006). Menurut World Bank (1992) menyatakan bahwa *good governance* adalah

“sebagai salah satu penyelenggara manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar efisien, penghindaran, salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggota serta penciptaan legal dan *political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.” Maka dapat disimpulkan jika suatu organisasi atau pemerintah tidak

memiliki tata kelola yaitu *good governance* maka akan mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

### **2.6.2. Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Lingkungan pengendalian adalah komponen pengendalian internal. Jika suatu pemerintahan memiliki suasana kerja, lingkungan dan kontribusi yang baik maka akan meningkatkan kinerja dari instansi pemerintah tersebut.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, definisi Sistem Pengendalian Intern adalah

“proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.”

Maka dapat disimpulkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Pemerintahan yang mampu dalam memenuhi skala, kompleksitas dan kewajiban, sistem pengendalian internal yang baik adalah pemerintahan yang mampu menghindari kecurangan sehingga dapat menciptakan akuntabilitas kinerja yang bagus.

### **2.6.3. Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Menurut Kenis (1979) kejelasan sasaran anggaran adalah sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Dalam konteks ini, kejelasan sasaran anggaran berarti seperti apa rancangan anggaran yang direncanakan secara jelas atau tidak ambigu. Sasaran anggaran yang sudah dirancang harus terukur dan dicapai di masa depan untuk memotivasi manajemen agar lebih efektif dan efisien.

Kejelasan sasaran anggaran dimaksudkan sebagai alat untuk mengendalikan karyawan. Para karyawan tidak akan betah dengan pekerjaannya apabila memiliki tujuan anggaran yang tidak jelas. Hal ini akan menyebabkan kurangnya motivasi di antara para pegawai untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dengan demikian, efektivitas kinerja karyawan berpengaruh terhadap kejelasan sasaran anggaran. Berdasarkan beberapa pandangan, dapat disimpulkan jika kejelasan sasaran anggaran dapat berdampak positif terhadap akuntabilitas instansi pemerintah dalam pelaksanaannya.

## 2.7. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sudah banyak dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya termasuk kelima penelitian terdahulu yang peneliti gunakan sebagai dasar penelitian ini. Kelima penelitian terdahulu yang digunakan, membahas mengenai variabel dependen yang sama, yaitu akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Variabel independen, dan subjek penelitian pada penelitian ini berbeda dengan penelitian yang terdahulu. Penelitian terdahulu yang pertama, dilakukan oleh Silalahi (2017) pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran dan pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Sedang Bedagai

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Christy (2020) pada Satuan Kinerja Perangkat Daerah di Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa *good governance* berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah daerah akan tetapi sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Tamba (2021) pada organisasi perangkat daerah Kabupaten Simalungun menunjukkan kejelasan sasaran anggaran dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja.

Penelitian keempat yang dilakukan oleh Samosir (2020) pada BPKAD pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran dan pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah BPKAD pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Penelitian yang kelima dilakukan oleh Damayanti (2017) Pada satuan kerja pemerintah daerah Kabupaten Deli Serdang yang menunjukkan pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah SKPD di Kabupaten Deli Serdang.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Peneliti	Variabel	Subjek	Hasil
1	Silalahi (2017)	Variabel Independen: X1 = Kejelasan Sasaran Anggaran X2 = Pengendalian internal X3 = Sistem Pelaporan Z = Komitmen Organisasi  Variabel Dependen: Y = Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kabupaten Serdang Bedagai	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.</li> <li>Pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.</li> <li>Sistem pelaporan berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.</li> <li>Komitmen organisasi merupakan variabel pemoderasi mampu memoderasi hubungan antara kejelasan sasaran anggaran, pengendalian internal, dan sistem pelaporan dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.</li> </ol>

2	Christy (2020)	<p>Variabel Independen: X1 = <i>Good governance</i> X2 = Sistem pengendalian intern pemerintah</p> <p>Variabel Dependen: Y = Kinerja Pemerintah daerah</p>	Kota Yogyakarta	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Good governance</i> berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah</li> <li>2. Sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.</li> </ol>
3	Tamba (2021)	<p>Variabel Independen: X1 = Kejelasan Sasaran Anggaran X2 = Sistem Pengendalian Internal</p>	Kabupaten Simalungun	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.</li> <li>2. Sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja.</li> </ol>

		<p>Z= Komitmen Organisasi</p> <p>Variabel Dependens: Y = Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</p>		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Komitmen organisasi dapat memoderasi hubungan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja</li> <li>4. Komitmen organisasi dapat memoderasi hubungan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas kinerja</li> </ol>
4	Samosir (2020)	<p>Variabel Independen:</p> <p>X1 =Kejelasan Sasaran Anggaran X2 =Pengendalian Internal X3 = Sistem Pelaporan X4 = Anggaran Daerah Berbasis Kinerja</p> <p>Variabel Dependens Y =Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</p>	BPKAD Provinsi Sumatera Utara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.</li> <li>2. Pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.</li> <li>3. Sistem pelaporan berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.</li> <li>4. Anggaran daerah berbasis kinerja berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.</li> </ol>

5	Damayanti (2017)	<p>Variabel Independen: X1 = Pengendalian internal X2 = Pemanfaatan teknologi informasi X3 = Akuntabilitas publik</p> <p>Variabel Dependen: Y = Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</p>	Kabupaten Manggarai Timur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerapan pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah</li> <li>2. Teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah</li> <li>3. Penerapan pengendalian internal secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah</li> <li>4. Kualitas pemanfaatan teknologi informasi parsial tidak berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah</li> <li>5. Kualitas akuntabilitas publik secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah</li> </ol>
---	---------------------	---	---------------------------	---

Sumber: Penelitian-penelitian terdahulu



## **2.8. Pengembangan Hipotesis**

### **2.8.1. Pengaruh *Good Governance* terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Menurut World Bank (1992) *good governance* memiliki definisi

“sebagai salah satu penyelenggara manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar efisien, penghindaran, salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan *political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.”

Diharapkan pemerintah dapat menerapkan *good governance* dan menyelenggarakan manajemen pembangunan yang baik dan bertanggungjawab demi upaya dalam menyejahterakan masyarakat, dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas instansi pemerintah. Hasil penelitian Christy (2020) menunjukkan bahwa *good governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan teori dan hasil di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>1</sub>: *Good Governance* berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

### **2.8.2. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, definisi Sistem Pengendalian Intern adalah

“proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan

efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.”

Sistem Pengendalian Internal harus dilaksanakan oleh lembaga untuk mencapai tujuannya. Sistem pengendalian internal juga berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran di dalam instansi tersebut. Hasil penelitian Samosir (2020) di BPKAD Provinsi Sumatera Utara membuktikan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sementara itu hasil penelitian Tamba (2021) di Kabupaten Simalungun memberikan kesimpulan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan teori dan hasil penelitian, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

**H<sub>2</sub>: Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

### **2.8.3. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Menurut Kenis (1979) kejelasan sasaran anggaran adalah sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Dalam hal ini pemerintah selaku pihak yang mengelola dana masyarakat harus dapat menyediakan laporan yang terpercaya, akurat, konsisten dan relevan demi menciptakan akuntabilitas yang baik. Hasil penelitian dari Silalahi (2017) menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran

berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penelitian Tamba (2021) dan Samosir (2020) memiliki hasil yang sama yaitu kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan teori dan hasil penelitian maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H<sub>3</sub>: Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**